

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

RKPD 2014 Kabupaten Kuningan merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2012. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.

Secara umum permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap SKPD dan urusan yang menjadi tupoksi masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain. Namun dalam setiap permasalahan harus selalu diusahakan solusi yang terbaik bagi perkembangan dan kelanjutan pembangunan Kabupaten Kuningan, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2012.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Daerah

Tabel 2.19

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah tahun 2012

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	Pendidikan	Kendala yang muncul terkait pengembangan pendidikan di Kabupaten Kuningan diantaranya dapat dilihat dari perbandingan mutu SDM yang berada di daerah perkotaan cenderung relatif lebih baik dibanding di daerah perdesaan. Hal ini terjadi karena akses ke berbagai fasilitas dan pelayanan masyarakat terutama yang berhubungan dengan pendidikan lebih mudah diperoleh sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang cenderung lebih baik sehingga kesempatan untuk meningkatkan mutu SDM lebih baik.	Penempatan tenaga guru yang kompeten disertai dengan mekanisme insentif dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana menuju pusat-pusat pengembangan pendidikan, tunjangan khusus tenaga guru di desa terpencil, pengembangan sekolah satu atap, pengembangan paket C dan A .

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Rendahnya daya tampung dan daya dukung fasilitas pendidikan baik formal maupun informal	Penambahan daya tampung sekolah, dan sarana pendidikan yang memadai
		Terbatasnya Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.	Tersedianya Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
		Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.	Adanya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
		Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP.	Adanya Perbaikan kerusakan dan tersedianya fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP.
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan.	Tingginya partisipasi masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan.
2	Kesehatan	Pengembangan kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan belum dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada saat anggaran masih tersedia.	Adanya Pengembangan kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan
		Pembiayaan kesehatan yang masih cenderung pada aspek kuratif dibandingkan aspek promotif dan preventif yang mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien	Adanya Pemerataan pembiayaan kesehatan pada semua aspek
		Tingginya angka BOR Rawat Inap Kelas III dan menyebabkan pasien miskin tidak Terlayani	Tersedianya gedung rawat inap kelas III
		Masih kurang lengkapnya dokter spesialis untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan	Tersedianya dokter spesialis untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan
		Masih mahal dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Mudahnya dan terjangkau akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
		Masih kurang lengkapnya peralatan kesehatan terutama untuk penyakit rujukan	Tersedianya kelengkapan peralatan kesehatan terutama untuk penyakit rujukan
3	Pekerjaan Umum	Kondisi dan daya tahan infrastruktur jaringan jalan dan bangunan pelengkap dipengaruhi oleh cuaca akibat global warming sehingga mempengaruhi kondisi eksisting dan umur rencana.	Tersedianya infrastruktur jaringan jalan dan bangunan pelengkap yang tahan terhadap cuaca
		Kurang terkendalinya pengguna jalan tentang batasan tonase angkutan berat yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST).	Terkendalinya pengguna jalan tentang batasan tonase angkutan berat yang diizinkan sesuai dengan kelas jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST).
		Pembuatan saluran tidak terlepas dari peran serta masyarakat terutama yang melewati rencana pembuatan saluran. Pada implementasinya tidak semua warga bersedia dilewati oleh saluran	Terlaksananya pembuatan saluran serta peran serta masyarakat

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Belum tersedianya master plan drainase dan belum terintegrasinya system drainase Metropolitan Kuningan sehingga penanganannya akan terlihat terpisah-pisah.	Tersedianya master plan drainase dan terintegrasinya sistem drainase Metropolitan Kuningan
		Sumber air baku untuk irigasi mengalami penurunan dengan disparitas tinggi, yang diakibatkan perubahan fungsi lahan dan semakin sempitnya daerah irigasi.	Optimalisasi pengaturan dan operasional irigasi.
		Alih fungsi lahan beririgasi sulit dikendalikan.	Tidak adanya Alih fungsi lahan beririgasi
		Garis sempadan saluran irigasi sulit diatur.	Adanya Garis sempadan saluran irigasi yang baku
4	Perumahan	Cakupan pelayanan air bersih pedesaan yang dilaksanakan Dinas Pertasih Kabupaten Kuningan sampai dengan tahun 2011 baru mencapai 16,00 %	Tersedianya dokumen master plan air bersih pedesaan dan sanitasi sehingga memudahkan dalam menyusun target yang sebenarnya untuk setiap tahun berikutnya.
5	Penataan ruang	Pembuatan dokumen RDTR yang mengacu kepada RTRW sampai tahun 2010 baru sebanyak 7 dokumen/kota dari rencana sampai tahun 2010 sebanyak 10 dokumen/kota.	Adanya dokumen RDTR yang mengacu kepada RTRW akan dilanjutkan kembali pada tahun 2011 sebanyak 3 dokumen/kota sehingga dapat mencapai target 10 dokumen/kota.
6	Perencanaan Pembangunan	Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.	Cukupnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.
		Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, terutama pada Bidang Perencanaan.	Tersedianya struktur organisasi yang memadai.
		Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA yang sudah ditetapkan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran. harus dirubah di dalam proses perubahan	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.
		Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.	Ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
		Belum optimalnya penerapan hasil penelitian sebagai bahan perencanaan	Bermanfaatnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan
7	Perhubungan	Masih banyak terminal-terminal bayangan yang berpotensi mengganggu.	Tidak adanya terminal-terminal bayangan yang berpotensi mengganggu.
		Meluasnya titik-titik rawan kemacetan dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas.	Berkurangnya titik-titik rawan kemacetan sehingga menurunnya kecelakaan lalu lintas.
		Dari jumlah keseluruhan TC yang ada, idealnya untuk pemeliharaan PJU setiap tahunnya adalah sebesar 40 % dari jumlah keseluruhan TC, namun karena terbatasnya anggaran maka pemeliharaan	Meratanya Anggaran jumlah keseluruhan TC terhadap Pemeliharaan PJU

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		PJU tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya.	
		Faktor keamanan alat-alat PJU seperti contactor magnet, kabel, foto cell, MCB yang masih minim dan kurangnya sarana prasarana seperti kendaraan crane.	Tersedianya kelengkapan keamanan alat-alat PJU dan sarana prasarana seperti kendaraan crane.
8	Lingkungan hidup	Masih rendahnya partisipasi sekolah dalam Program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL).	Tingginya partisipasi sekolah dalam Program Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL).
		Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke sungai, terutama masyarakat yang tinggal berdekatan dengan sungai.	Adanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembuangan sampah ke sungai.
		Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai
		Masih banyak timbunan sampah yang tidak terkelola.	Terangkutnya timbunan sampah
9	Pertanahan	Masih sulitnya pelaksanaan pembebasan/pengadaan lahan/tanah disebabkan oleh beberapa permasalahan terutama penentuan harga tanah dan administrasi pertanahan;	Adanya koordinasi pelaksanaan pembebasan/pengadaan lahan/tanah disebabkan oleh beberapa permasalahan terutama penentuan harga tanah dan administrasi pertanahan;
		Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan;	Terselesaikannya permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan;
		Masih kurangnya sosialisasi program-program strategis kepada masyarakat yang memerlukan fisik lahan.	Banyaknya sosialisasi program-program strategis kepada masyarakat yang memerlukan fisik lahan.
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda	Tersedianya data penduduk yang akurat (valid)
		Belum tercapainya Masyarakat Kabupaten Kuningan yang sadar hukum dan tertib Adminduk	Meningkatnya kecadaran Masyarakat Kabupaten Kuningan akan hukum dan tertib Adminduk
		Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan	Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan
		Kegiatan pendataan belum dapat dilaksanakan, yang dikhawatirkan terjadinya over lap dari sumber anggaran (APBD dan APBN) dalam kegiatan pemutakhiran data.	Terlaksananya pendataan sesuai dengan Jadwal
11	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pelaksana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia pelaksana program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
		Program dan kegiatan yang dilakukan masih bersifat sosialisasi belum operasional secara teknis	Adanya pendalaman program dalam kegiatan sehingga tercapai dengan baik
		Masih Kurangnya data penunjang yang akan mendukung tentang kegiatan Trafficking, KDRT, Perlindungan HAK-hak anak	Tersedianya data penunjang yang akan mendukung tentang kegiatan Trafficking, KDRT, Perlindungan HAK-hak anak

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Masyarakat secara umum belum memahami tempat rujukan ketika terjadi pelanggaran terhadap gender dan anak.	Adanya Sosialisasi terhadap Masyarakat secara umum yang belum memahami tempat rujukan ketika terjadi pelanggaran terhadap gender dan anak.
		Belum optimalnya pembuat kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan.	Adanya Optimalisasi pembuat kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan.
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peran Pria dalam KB masih rendah hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya Pencapaian peserta KB baru MOP dan akseptor KB Kondom.	Peran Pria dalam KB masih rendah hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya Pencapaian peserta KB baru MOP dan akseptor KB Kondom.
		Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.	Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
13	Sosial	Penanganan pengemis, gelandangan, preman, geng jalaan, PSK yang belum optimal	Penanganan pengemis, gelandangan, preman, geng jalanan, PSK yang belum optimal
		Adanya kecenderungan peningkatan kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak	Menurunnya kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak
		Penanganan upaya penanggulangan kemiskinan masih bersifat sektoral dan dilakukan oleh masing-masing SKPD	Adanya koordinasi terhadap Penanganan upaya penanggulangan kemiskinan di setiap SKPD
		Proses pendataan korban bencana alam masih belum akurat, sehingga mempengaruhi akurasi pemberian jatah logistik dan bantuan lainnya bagi korban bencana.	Tersedianya data korban bencana alam yang akurat.
14	Ketenagakerjaan	Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memenuhi standar keahlian / keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha / industri.	Tercetaknya tenaga kerja yang memenuhi standar keahlian/keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri.
		Masih banyaknya masyarakat pencari kerja	Berkurangnya pengangguran
		Fluktuasi harga selalu berubah dari waktu-kewaktu sesuai dgn pertumbuhan ekonomi	Terjaga Stabilitas ekonomi
		Kurangnya pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan	Adanya pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan
		Tingginya kasus-kasus ketenagakerjaan	Menurunnya kasus-kasus ketenagakerjaan
		Masih rendahnya pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
15	Koperasi, UKM	Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi, manajemen dan wawasan bisnis, di mana hal ini	Meningkatnya wirausaha-wirausaha baru yang bisa mempunyai kapabilitas memadai untuk berkembang

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		sangat mempengaruhi daya saing produksi UKM/IKM untuk menciptakan peluang usaha.	
		Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah.	Meningkatnya perbankan atau bidang keuangan lainnya yang memberikan permodalan bagi yang Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan bunga rendah
		Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang sehat)	Banyaknya koperasi yang memenuhi persyaratan operasional (sehat)
		Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan	Terbukanya akses pemasaran terhadap pasar industri kecil menengah
16	Penanaman Modal	Belum lengkapnya sarana dan prasarana Badan Pelayanan Perijinan terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan, dalam menunjang pelaksanaan tugas tugas yang di laksanakan baik untuk kepentingan informasi dan promosi investasi bagi para calon insvestor ;	Tersedianya sarana dan prasarana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kuningan, dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi dan promosi investasi bagi para calon investor;
		Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi;	Meningkatnya Investor luar
		Regulasi yang baik pusat maupun daerah yang belum sepenuhnya mendukung arus investasi.	Ada Regulasi yang sejalan baik pusat maupun daerah dalam mendukung arus investasi.
		Proyek-proyek yang akan dikerjasamakan masih tidak ditunjang dengan regulasi dalam bentuk insentif sehingga menjadi daya tarik mitra dari kalangan swasta untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah;	Tersusunnya regulasi mengenai insentif terhadap investor-investor baru;
		Kegiatan usaha yang tidak memperhatikan potensi daerah	Adanya kesadaran terhadap Kegiatan usaha untuk memperhatikan potensi daerah
		Terlalu banyaknya perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasinya	Terciptanya standar dokumen-dokumen perijinan yang profesional namun lebih taktis.
		Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya investasi bagi pembangunan daerah
		SDM pengelola perijinan yang harus ditingkatkan	Meningkatnya profesionalisme dan SDM pengelola perijinan
17	Kebudayaan	Kurangnya kepedulian dan rasa memiliki akan nilai-nilai budaya sunda	Meningkatnya kepedulian dan rasa memiliki akan nilai-nilai budaya sunda
		Belum optimalnya inventarisasi data Kebudayaan	Optimalisasi pendataan kebudayaan
		Kurangnya sumberdaya manusia Kebudayaan	Meningkatnya sumberdaya manusia tentang kebudayaan
		Kurangnya sarana dan prasarana Kebudayaan	Terbangunnya sarana dan prasarana kebudayaan yang baru

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
18	Pemuda dan Olahraga	Kurang teridentifikasinya bakat dan potensi pelajar dalam bidang olah raga yang spesifik.	Bermunculannya bakat-bakat dan potensi pelajar dalam bidang olahraga.
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, terutama di pedesaan.	Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga, terutama di pedesaan.
		Masih kurangnya pemanfaatan iptek dalam pengembangan olah raga baik dari sarana maupun prasarananya.	Bertambahnya pemanfaatan iptek dalam pengembangan olah raga baik dari sarana maupun prasarananya.
19	Kesbanglinmas	Masih banyaknya rumah tinggal yang dijadikan tempat peribadatan di wilayah Kabupaten Kuningan	Adanya kesadaran dari warga untuk memahami kerukunan agama
		Masih adanya sempalan-sempalan aliran keagamaan di wilayah Kabupaten Kuningan	Meningkatkan kerukunan beragama, dan penertiban aliran keagamaan yang menyimpang
		Banyaknya LSM, ORMAS dan Yayasan yang belum mendaftarkan keberadaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, tetapi mereka sering melakukan aktivitas/kegiatannya di Wilayah Kabupaten Kuningan.	Meningkatnya rasa kesadaran masyarakat tentang pentingnya perijinan
		Semakin banyak dan berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah yaitu dengan berjualan diatas jalur-jalur terlarang seperti berjualan dibahu jalan dan trotoar yang umumnya mengganggu pejalan kaki	Meningkatnya rasa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan/kepentingan umum, dan tata cara berdagang yang baik
		Makin banyaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung	Banyak terbongkarnya penjualan minuman keras beralkohol yang terselubung
		Masih banyaknya jumlah penyandang masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Kuningan	Berkurangnya jumlah penyandang masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Kuningan
		Koordinasi anatar stakeholder dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah belum sibnergis dan terpadu	Terjalinnya koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah belum sibnergis dan terpadu
		Program dan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah belum dipahami dan diketahui masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat, mengingat BPBD Kabupaten Kuningan baru trbentuk melalui Perda No. 11 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010.	Bertambahnya pemahaman tentang fungsi dan wewenang BPBD
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sistem pelaporan dari tingkat kecamatan dan kelurahan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya (masih terdapat keterlambatan).	Bertambahnya pemahaman tentang pelaporan dari tingkat kecamatan dan kelurahan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya (masih terdapat keterlambatan).

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.	Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
		<p>Dalam pengusulan penerbitan kepbup, MoU, perjanjian dan instruksi bupati data</p> <p>a. data yang disampaikan kepada Bagian Hukum tidak dilengkapi dengan lampiran</p> <p>b. lampiran data produk hukum yang mendasari proses pembuatan produk hukum dimaksud.</p>	Meningkatnya koordinasi dengan SKPD terkait berkenaan dengan penerbitan keputusan bupati, MoU, perjanjian dan instruksi bupati.
		Kurangnya pemahaman aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum, sehingga hal ini seringkali menimbulkan salah persepsi dari aparat bahwa setiap permasalahan baik pidana, perdata, maupun Tata Usaha Negara dianggap sama.	Bertambahnya pemahaman aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum,.
		Kurangnya koordinasi dari aparat/SKPD yang terkait. Pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti pemberian informasi dan data pendukung, sehingga seringkali menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus.	Bertambahnya koordinasi dari aparat/SKPD yang terkait.
		Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kepada camat maupun lurah	Meningkatnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kepada camat maupun lurah
		Penyajian data potensi wilayah baik tingkat kecamatan maupun desa kurang lengkap sehingga tingkat validitasnya cenderung rendah.	Tersedianya data-data Penyajian data potensi yang valid
		Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.	Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
		Adanya keterbatasan modal PD. BPR yang bersumber dari penyertaan modal, sehingga belum dapat melayani sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan dalam pemberian kredit dengan bunga yang murah.	Adanya keterbatasan modal PD. BPR yang bersumber dari penyertaan modal, sehingga Belum dapat melayani sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan dalam pemberian kredit dengan bunga yang murah.
		Masih kurangnya pemahaman peserta pemantapan petugas sosial bencana mengenai penanganan bencana alam.	Masih kurangnya pemahaman peserta pemantapan petugas sosial bencana mengenai penanganan bencana alam.
		Masih kurangnya koordinasi antara SKPD pengolah rekomendasi bantuan yang telah direkomendasikan dengan realisasi yang ada.	Masih kurangnya koordinasi antara SKPD pengolah rekomendasi bantuan yang telah direkomendasikan dengan realisasi yang ada.
		Kurangnya pemahaman dari SKPD terhadap prosedur yang harus dilakukan dikala adanya barang milik	Kurangnya pemahaman dari SKPD terhadap prosedur yang harus dilakukan dikala adanya

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		daerah yang akan dihapuskan sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap perhitungan neraca.	barang milik daerah yang akan dihapuskan sehingga hal ini akan mempengaruhi terhadap perhitungan neraca.
		<p>Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu penyebabnya adalah :</p> <p>a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya</p> <p>b. Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak</p> <p>c. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya</p>	<p>Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu penyebabnya adalah :</p> <p>a. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya</p> <p>b. Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak</p> <p>c. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya</p> <p>d. Pemungutan pajak daerah dengan system Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah</p>
		Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.	Meningkatkan kesadaran hukum kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/ menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF.
		Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.	Luasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
		Kurangnya pemahaman aparat mengenai esensi pemberian bantuan hukum, sehingga menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan baik pidana, perdata maupun tata usaha negara adalah sama.	Adanya pemahaman aparat mengenai esensi pemberian bantuan hukum.
		Masih adanya ketidaksesuaian proses dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Tidak adanya ketidaksesuaian proses dan mekanisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
		Kesadaran para pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah masih belum optimal terhadap arti penting fungsi pengawasan	Meningkatnya kesadaran para pimpinan satuan kerja Perangkat Daerah mengenai pentingnya pengawasan maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional / APF (BPK-RI) maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah / APIP (Irjen, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Kuningan)
		Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengawasan, dengan upaya sosialisasi secara langsung maupun melalui Media

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah	Massa baik cetak maupun elektronika
		Dana pengawasan yang dialokasikan dalam APBD tidak seimbang dengan dana penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan lainnya, bertambahnya beban tugas pengawasan seiring dengan Otonomi Daerah belum disertai dengan dukungan dana yang memadai	Terpenuhinya Dana pengawasan
21	Ketahanan Pangan	Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD	Tersedianya data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD
		Kurangnya ketersediaan data untuk produksi komoditas pertanian dan konsumsi terhadap pangan dari SKPD	Tersedianya data untuk produksi komoditas pertanian dan konsumsi terhadap pangan dari SKPD
		Terbatasnya ketersediaan data primer dan skunder untuk kajian rantai, pasokan dan pemasaran pangan	Tersedianya data primer dan skunder untuk kajian rantai, pasokan dan pemasaran pangan
		masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik	Tersusunnya petunjuk pelaksanaan lumbung dan pembinaan pengelolaan lumbung pangan
		Pemahaman program Desa Mandiri Pangan masih kurang dan masih adanya masyarakat yang belum menerima fasilitasi kegiatan melalui kelompok afinitas	Meningkatnya Pemahaman program Desa Mandiri Pangan
		Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan	Bertambahnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan
22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ketercapaian kegiatan pada umumnya disebabkan karena belum optimalnya SDM di desa dan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pencapaian tujuan kegiatan.	Meningkatnya SDM desa dan partisipasi masyarakat
		Tertundanya pelaksanaan Pilkades disebabkan adanya pelaksanaan Pilkades.	Adanya Penjadwalan ulang untuk pelaksanaan Pilkades
		Tertundanya sebagian kegiatan karena belum terpetakannya jadwal kegiatan dalam pencapaian target kinerja	Tersusunnya jadwal kegiatan dari setiap bidang secara terperinci setiap bulan selama satu tahun anggaran
24	Kearsipan	Belum optimalnya penataan arsip di SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan	Optimalisasi penataan arsip di SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab
		Belum optimalnya pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat	Terselenggaranya pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat secara optimal
		Belum optimalnya pemahaman, wawasan dan pengetahuan pejabat fungsional arsiparis dan petugas	Meningkatnya pemahaman, wawasan dan pengetahuan pejabat fungsional arsiparis dan petugas

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		pengelola kearsipan terhadap produk-produk hukum atau peraturan-peraturan kearsipan	pengelola kearsipan terhadap produk-produk hukum atau peraturan-peraturan Kearsipan
25	Informasi dan komunikasi	Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;	Bertambahnya pegawai dengan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
		Tingkat pemanfaatan dan efektivitas kegiatan bidang teknologi informasi, tidak merata di semua kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara rutin, untuk menemukan kendala yang terjadi di lapangan dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan ulang jika diperlukan. Adanya surat dari Sekretaris Daerah perihal Pemanfaatan Sarana Prasarana TIK di lingkungan kecamatan;
		Belum optimalnya upaya penyebaran informasi melalui media pameran, radio, dan majalah Pemda yang disebabkan terbatasnya SDM, sarana dan prasarana;	Terselenggaranya penyebaran informasi melalui media pameran, radio, dan majalah Pemda
		Belum seragamnya pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik	Adanya keseragam pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik
26	Perpustakaan	Belum optimalnya penyelenggaraan semua jenis perpustakaan	Adanya peningkatan penyelenggaraan semua jenis perpustakaan secara optimal
		Terbatasnya karyawan/karya-wati Bidang Perpustakaan dalam melayani kebutuhan pemakai/pengguna perpustakaan keliling dan GMB (Gebyar Minat Baca)	Tercukupinya karyawan/karyawati Bidang Perpustakaan dalam melayani kebutuhan pemakai/pengguna perpustakaan keliling dan GMB (Gebyar Minat Baca)
		Masih terbatasnya koleksi majalah dan surat kabar yang didayagunakan oleh pemakai	Terpenuhinya/tercukupi koleksi majalah dan surat kabar yang didayagunakan oleh pemakai
		Belum adanya jabatan fungsional pustakawan	Adanya jabatan fungsional pustakawan
27	Pertanian	Penerapan Teknologi belum Optimal.	Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah lingkungan,
		Masih terjadinya fluktuasi harga akibat dari cara serta pola tanam para petani	Pengaturan pola tanam
		Belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan penduduk yang masih didominasi oleh kelompok bahan pangan padipadian.	
		Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha.	
		Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat peternakan dalam melaksanakan usaha budidaya peternakan dan perikanan sesuai dengan standar teknis budidaya.	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		<p>Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah</p> <p>Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas</p>	
28	Kehutanan	<p>Adanya praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta banyaknya penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama telah mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis di Kabupaten Kuningan</p> <p>Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Kuningan cukup memprihatinkan sehingga menyebabkan tingkat erosi yang terjadi di Kabupaten Kuningan berkisar mulai dari kategori sedang sampai dengan berat</p> <p>Masih kurangnya kesepakatan desa dalam melarang penduduk desa menebang kayu di kawasan hutan dan penebangan liar yang dilakukan pihak luar</p> <p>Masih kurangnya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas yang dikehendaki</p>	<p>Terlaksananya praktek-praktek budidaya pertanian yang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air sehingga akan mengurangi luas lahan kritis</p> <p>Bertambahnya volume fisik yang sesuai dengan target dan memenuhi kualitas yang dikehendaki</p>
29	Energi dan SD Mineral	<p>Belum optimalnya koordinasi antara pelaksana pengawasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah dengan pengelola pajak air tanah, dimana</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan Good Mining Practice oleh pengusaha pertambangan, antara lain akibat dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia</p>	<p>Adanya Optimalisasi pelaksanaan Good Mining Practice oleh pengusaha pertambangan, antara lain akibat dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (rata-rata</p>
30	Pariwisata	<p>Masih kurangnya materi pameran produk unggulan yang berpotensi dari para pelaku jasa usaha pariwisata di Kabupaten Kuningan</p> <p>Masih belum memadai data kepariwisataan secara komprehensif berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kuningan.</p> <p>Belum adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap paguyuban mojang jajaka, kompepar dalam rangka sinergitas kelompok-kelompok</p>	<p>Banyaknya peminat yang mengikuti materi pameran produk unggulan</p> <p>Memadainya data kepariwisataan secara komprehensif berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kuningan.</p> <p>Adanya pembinaan yang berkesinambungan terhadap paguyuban mojang jajaka, kompepar dalam rangka sinergitas kelompok-kelompok tersebut</p>

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
		tersebut dengan jasa usaha pariwisata dan dengan Pemerintah.	dengan jasa usaha pariwisata dan dengan Pemerintah.
		Masih belum memadai data permasalahan kepariwisataan secara komprehensif berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kuningan.	Adanya Monev yang berkesinambungan yang sesuai dengan potensi pariwisata di Kabupaten Kuningan.
31	Kelautan dan Perikanan	Masih tingginya ancaman penyakit pada Ternak ikan yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha.	Berkurangnya ancaman penyakit pada ternak ikan yang dapat mengganggu produktivitas dan merugikan usaha.
		Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat perikanan dalam melaksanakan usaha budidaya perikanan sesuai dengan standar teknis budidaya.	Meningkatnya pengetahuan, Sikap dan Keterampilan peternak dan Petani ikan melalui diseminasi dan penerapan teknologi Perikanan
32	Perdagangan	Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan.	Terselenggaranya rutinitas penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan.
		Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan masih adanya berat bersih barang yang terdapat pada kemasan tidak sesuai dengan berat fisik sebenarnya.	Tidak adanya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dan masih adanya berat bersih barang yang terdapat pada kemasan tidak sesuai dengan berat fisik sebenarnya.
		Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan	Tercukupinya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan
		Masih adanya komoditi LHE yang tidak sesuai dengan standar dan etika label yang berlaku dan masih beredarnya BJLS dan BJPB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Tidak adanya komoditi LHE yang tidak sesuai dengan standar dan etika label yang berlaku dan masih beredarnya BJLS dan BJPB yang belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
		Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya.	
32	Industri	Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan.	Tersedianya/tercukupinya tenaga penyuluh di sektor industri dan perdagangan.
		Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya.	Adanya pemahaman dari perusahaan untuk menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya
		Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah.	Meningkatnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah.
		Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.	Meningkatnya akses pemasaran produk IKM.
		Masih kurangnya sarana dan prasarana produksi dan permodalan.	Tersedia/terpenuhinya sarana dan prasarana produksi dan permodalan.
33	Ketransmigrasian	Terbatasnya alokasi target penempatan transmigran di wilayah luar Jawa.	Tercukupinya alokasi target penempatan transmigran di wilayah luar Jawa.
		Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal.	Penambahan waktu pelatihan
		Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat.	Adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Urusan dan Program Prioritas

Tabel 2.20
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Bidang Fisik

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Pekerjaan Umum :			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (jalan kabupaten)	Dari total panjang jalan 416,10 km, kondisi baik/cukup baik 79% (328,72 km); rusak ringan 10,8% (44,94 km) dan rusak berat 10,3% (42,86 km)	Umur konstruksi jalan yang pendek mengakibatkan kualitas jalan mudah menurun	Peningkatan kualitas bahan baku dan rencana/desain teknis jalan
3.2.	Rasio jaringan irigasi (bendungan, bangunan, saluran induk dan saluran sekunder)	<ul style="list-style-type: none"> - Total bendungan 641 unit (339 unit kondisi baik, 190 unit rusak ringan dan 112 unit rusak berat); - Total bangunan 1.796 unit (989 unit kondisi baik, 479 unit rusak ringan dan 328 unit rusak berat); - Total saluran induk 104.439 unit (57.680 unit kondisi baik, 28.327 unit rusak ringan dan 18.432 unit rusak berat); - Total saluran sekunder 447.076 unit (186.237 unit kondisi baik, 148.776 unit rusak ringan dan 112.063 unit rusak berat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya master plan drainase kabupaten sebagai acuan pembangunan maupun rehab jaringan/saluran; - Sumber air baku untuk irigasi mengalami penurunan dengan disparitas tinggi, yang diakibatkan perubahan fungsi lahan dan semakin sempitnya daerah irigasi; - Komitmen pemerintah terhadap insentif/pembebasan lahan sempadan belum berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen master plan drainase kabupaten; - Komitmen pemerintah terhadap insentif/pembebasan lahan sempadan
3.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah desa/kelurahan rawan sanitasi 35 desa (9,31%), sebanyak 341 desa/kel sanitasi cukup baik (90,69%). Realisasi tahun 2012 di 5 desa (1,33%)	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran pembangunan sanitasi permukiman terbatas sehingga fasilitas sanitasi belum maksimal; - Dokumen strategi sanitasi kab (SSK) belum tersedia 	Tersedianya dokumen master plan pembangunan sanitasi (SSK) dan partisipasi aktif masyarakat
4	Perumahan :			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih (perdesaan)	<p>Jumlah desa/kelurahan rawan air bersih 158 desa (42,02%)</p> <p>Realisasi tahun 2012 di 23</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran penyediaan sarana air bersih dan swadaya terbatas; - Jarak yang jauh/sulit dari mata 	Tersedianya dokumen master plan air bersih perdesaan dan partisipasi

		desa (6,12%)	air ke lokasi layanan; - Letak geografis desa	masyarakat
4.2.	Rumah tangga pengguna air bersih PDAM (perkotaan)	Cakupan pelayanan PDAM baru mencapai 39,55% (160.914 jiwa terlayani dari 406.824 jiwa penduduk), hal ini masih jauh dari target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang menargetkan cakupan pelayanan sebesar 60% untuk daerah perdesaan dan 80% untuk perkotaan	Anggaran yang terbatas dan bentang alam yang bervariasi	Tersedianya dukungan anggaran dari pemerintah dan dukung dari masyarakat untuk pengembangan jaringan
4.3.	Rumah layak huni	Realisasi tahun 2012 sebanyak 1.359 unit tersebar di 30 desa/ kelurahan dan 9 kec	- Anggaran bantuan rumah layak huni setiap tahunnya terbatas; - Dukungan partisipasi masyarakat terbatas	Meningkatnya anggaran dan partisipasi masyarakat
5	Penataan Ruang :			
5.1.	Ketaatan terhadap RTRW	Setiap perencanaan pemanfaatan ruang senantiasa mengacu pada kesesuaian peruntukkan dan peraturan zonasi RTRW	- Belum tersedianya Perda dokumen RDTR yang mengacu kepada RTRW; - Koordinasi penataan ruang belum efektif	Tersedianya Perda dokumen RDTR yang mengacu kepada RTRW dan bersifat operasional
5.2.	Luas wilayah produktif	Luas sawah irigasi 20.503 ha, alih fungsi selama 9 tahun sebesar 688 ha	Terjadinya alih fungsi menjadi fasilitas umum dan perumahan	Tersedianya Perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB) sesuai RTRW
6	Perhubungan :			
6.1.	Optimalisasi terminal	Tersedia 11 terminal, yang terdiri atas 1 terminal tipe A dan 10 terminal tipe C	Belum optimalnya pengoperasian terminal di Kabupaten Kuningan	Pengembangan akses jalan dan trayek menuju terminal
7	Lingkungan Hidup :			
7.1.	Penanganan sampah	Cakupan pelayanan sampah baru mencapai luasan wilayah 204,74 km ² (17,12%) pada 10 kecamatan (31,25%) dan 40 desa (10,63%) dengan jumlah 93.548 KK (31,34%) dan timbunan sampah 130 m ³ /hari (69,51%)	Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (praktik 3R)	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai serta dokumen master plan persampahan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah tahun 2012 berdasarkan 5 (lima) urusan 10 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan inti dari pembangunan tersebut meliputi :

- 1) Komitmen pemerintah daerah masih belum optimal baik dalam pengalokasian anggaran pembangunan sektor maupun penetapan kebijakan dalam bentuk produk hukum (Perda) sebagai acuan bagi para pihak yang berkepentingan;
- 2) Dokumen perencanaan teknis berupa master plan maupun yang lainnya pada beberapa sektor penting seperti air bersih, sanitasi (drainase, air limbah dan persampahan) dan tata ruang (Dokumen RDTR) belum tersedia. Padahal dokumen perencanaan teknis ini harus dipersiapkan sejak awal sehingga rencana maupun sasaran pembangunan menjadi lebih jelas dan tentunya sinergis dengan kawasan dalam rencana tata ruang (RTRW dan/ atau RDTR);
- 3) Alih fungsi lahan produktif seperti sawah irigasi yang cukup besar dalam jangka waktu 9 (sembilan) tahun yaitu mencapai 688 ha, harus segera diantisipasi melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara pasti sejalan dengan RTRW. Hal ini dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di daerah, sehingga produktivitas padi sawah diharapkan mampu mencapai produksi surplus;
- 4) Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan masih perlu terus ditingkatkan, sehingga 3 (tiga) domain dalam *good governance* era otonomi daerah yaitu antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dapat berjalan selaras dan sinergis bahu membahu sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

Dari beberapa point permasalahan ini yang telah ditentukan berdasarkan 5 (lima) urusan 10 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut di atas, kiranya dapat dijadikan dalam menentukan isu-isu yang dianggap strategis untuk rencana pembangunan ke depan. Beberapa isu yang dianggap penting dan strategis, antara lain adalah :

- 1) Peningkatan komitmen pemerintah;
- 2) Pentingnya dokumen perencanaan teknis/rinci yang tetap sinergis dengan RTRW;
- 3) Antisipasi alih fungsi lahan produktif termasuk sawah irigasi; dan
- 4) Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong kemandirian daerah.

Adapun permasalahan bidang pendidikan dan kesehatan dapat diidentifikasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.21

Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Bidang Pendidikan

Sumber : Perbandingan antara RKPD 2013 dengan SUSEDA 2012, Data Dinkes, Data Disdikpora				
No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) (=) Sesuai Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka Melek Huruf	Target 97,80 /Realisasi 97,76 (<)	1. Usia penduduk yang buta huruf kebanyakan Usia lanjut 2. Volume program lanjutan SUKMA masih relatif kecil 3. Pada jenjang SMP, SMA masih terdapat kekurangan guru serta adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan	1. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan 2. Tingginya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang pendidikan 3. Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal 4. Terjalannya koordinasi yang baik seluruh stake holder
1.2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Target 8,51 /Realisasi 8,64 (>)		
1.3.	Pendidikan Dasar;			
1.3.1.	Angka Partisipasi Sekolah :			
	APS SD APS SMP APS SM	Target 93,44 /Realisasi 101,42 (>) 105,65 50,25		
1.3.2.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah			
	SD SMP SMA	Target 1: 157 Realisasi 1: 166 (>) Target 1:432 Realisasi 1: 427 (<) Target 1:721 Realisasi 1: 468 (<)		
1.3.3.	Rasio Guru/Murid			
	SD	Target 1: 40 Realisasi 1: 23 (<)		

	SMP SMA	Target 1:28 Realisasi 1: 29 (>) Target 1:23 Realisasi 1: 31 (>)
1.4.	Angka Putus Sekolah	
	SD	0,02
	SMP	0,51
	SMA	0,53
	SMK	0,81
1.5	Angka Melanjutkan	
	SD/MI ke SMP/MTs	99,95
	SMP/MTs ke SMA	92,72
	SMA ke PT	62,34
1.6	Angka Lulusan Sekolah	
	SD	100%
	SMP	100%
	SMA	100%

Indikator-indikator Bidang Pendidikan di atas menunjukkan bahwa secara umum, ketercapaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Kuningan sudah cukup menggembirakan. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan sebagian besar target kinerja telah berhasil dicapai. Walaupun demikian indikator-indikator yang mengalami kinerja di bawah harapan (*underperformed*) seperti : Rasio ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Tingkat SLTA serta Rasio Guru/Murid Sekolah Dasar perlu tetap mendapatkan perhatian serius di masa yang akan datang.

Pada Bidang Kesehatan, yang harus menjadi fokus perhatian adalah Persentase Balita Gizi Buruk, baik untuk Kategori Sangat Kurus maupun Kurus, yang kondisi keduanya masih diluar harapan. Walaupun demikian, satu hal yang cukup menggembirakan yaitu melihat keterbatasan Anggaran Kesehatan di Kabupaten Kuningan, khususnya untuk penanganan Gizi Buruk, sudah sejak Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Barat telah memberikan Bantuan salah satunya ke Kabupaten Kuningan melalui Program Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Lingbasrangan) yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Program sejenis lainnya yang bersumber dari APBD Provinsi

Jawa Barat juga dilaksanakan di Kabupaten Kuningan melalui Program Revitalisasi Posyandu (Revipos) , yang pencanangannya juga dilakukan pada Tahun 2011.

Tabel 2.22

Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas Bidang Kesehatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Target 4,62 /Realisasi 6,11 (>)		
2.2.	Angka Usia Harapan Hidup	Target 7,80 /Realisasi 7,81 (>)		
2.3.	Persentase Balita Gizi Buruk	Target Sangat Kurus 0,17% /Realisasi 0,20% (<). Target Kurus 3,35% /Realisasi 3,40% (<)		
2.4.	Rasio Posyandu per Satuan Balita	1:20		
2.5.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	Rasio Puskesmas = 3,27 Rasio Pustu = 6,09		
2.6.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,71:1		